



RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2023

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jln. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086 Fax. 3584085 Hunting 3584077 Psw. 2710, 2712

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
NOMOR : B/2197/050/VII/2022

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka perlu disusun Rencana kerja Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 108);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023;

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. dan Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023;

KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya di tahun 2023;

- KEEMPAT : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 14 Juli 2022

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
DISKOP DAN
USAHA MIKRO
Drs. AGUS WURYANTO, M.Si.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
 MIKRO KOTA SEMARANG
 TENTANG
 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA
 MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2023

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Kota Semarang.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kota Semarang.....	21
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kota Semarang	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD KOTA SEMARANG.....	43
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Kota Semarang.....	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KOTA SEMARANG	49
BAB V PENUTUP.....	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

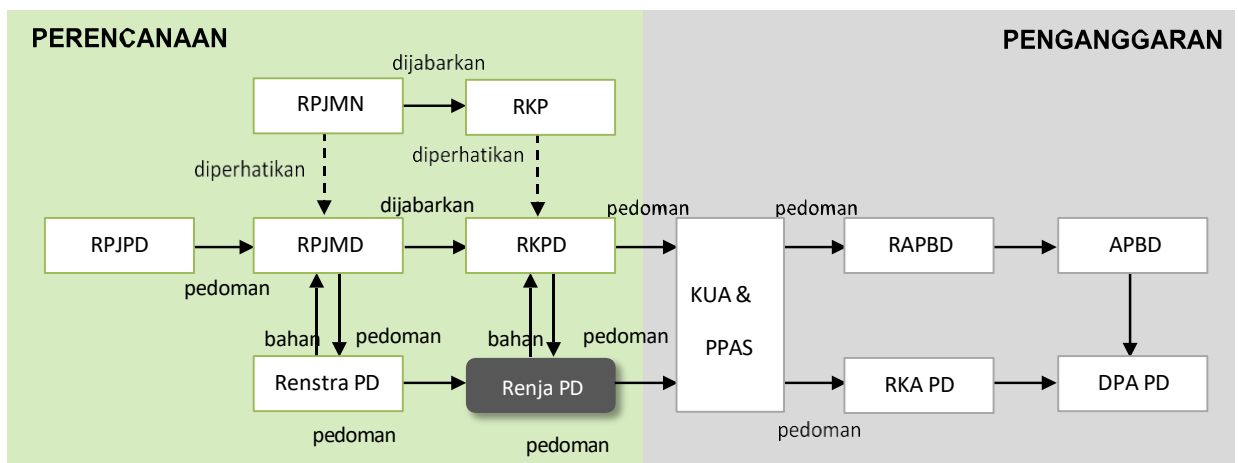
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026

yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;

- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana Semarang Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2022

Kualitas penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melaksanakan sebanyak 8 Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 21.742.870.123,- (Dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 17.634.959.089,- (Tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 81,11 %.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
Arah Kebijakan : Pelaporan kinerja dan keuangan OPD										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	45 dok	-	-	-	100%	9 dok	9 dok	20%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	8 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	20%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	4 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	20%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	1 dok	1 dok	20%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	1 dok	1 dok	20%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	1 dok	1 dok	20%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	12 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	20%
Arah Kebijakan : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	3 jenis	3 jenis	100%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	5 jenis	5 jenis	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	35 jenis	35 jenis	100%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	8 jenis	8 jenis	100%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	2 jenis	2 jenis	100%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1800 orang	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	1800 orang	1800 orang	100%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100 kegiatan	100 kegiatan	100%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	5 jenis	5 jenis	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	3 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	3 jenis	3 jenis	100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	2 jenis	2 jenis	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	1 unit	1 unit	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	25 unit	25 unit	100%
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	2 jenis	2 jenis	66.67%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	5 jenis	5 jenis	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
Arah Kebijakan : Pelaporan kinerja dan keuangan OPD										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100% (80%)	100% (20%)	100% (20%)	100% (100%)	100%	100% (20%)	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	13 dok	2 dok	2 dok	15 dok	3 dok	3 dok	20%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dok	4 dok	1 dok	1 dok	5 dok	1 dok	1 dok	20%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 dok	8 dok	2 dok	2 dok	10 dok	2 dok	2 dok	20%
Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian										
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	-	-	-	-	3%	3%	100%
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	-	-	-	-	15 koperasi	15 koperasi	20%
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 koperasi	-	-	-	-	25 koperasi	25 koperasi	16.67%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	10 koperasi	-	-	-	-	2 koperasi	2 koperasi	20%
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	150 koperasi	-	-	-	-	25 koperasi	25 koperasi	16.67%
Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian										
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	-	-	-	-	50%	50%	100%
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	-	-	-	-	100 koperasi	100 koperasi	83.33%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 koperasi	-	-	-	-	250 koperasi	250 koperasi	143%
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 koperasi	-	-	-	-	120 koperasi	120 koperasi	68.57%
Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian										
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	35%	-	-	-	-	30%	30%	85.71%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	-	-	-	-	66%	66%	94%
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 koperasi	-	-	-	-	200 koperasi	200 koperasi	66.67%
Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian										
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	-	-	-	-	10%	10%	100%
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	-	-	-	-	70%	70%	88%
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	-	-	-	-	80 orang	80 orang	20%
Arah Kebijakan : Penguatan Kelembagaan, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro										
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	2%	-	-	-	-	1%	1%	50%
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	75%	-	-	-	-	70%	70%	93%
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan	750 Orang	-	-	-	-	360 orang	360 orang	48%
Arah Kebijakan : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan usaha Perkoperasian										
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	30%	-	-	-	-	25%	25%	83%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	-	-	-	-	50%	50%	100%
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	150 koperasi	-	-	-	-	164 koperasi	164 koperasi	109%
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	125 koperasi	-	-	-	-	340 koperasi	340 koperasi	272%
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	200 koperasi	-	-	-	-	120 koperasi	120 koperasi	60%
		Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	300 koperasi	-	-	-	-	500 koperasi	500 koperasi	167%
		Jumlah laporan updating data Koperasi	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
Arah Kebijakan : Penguatan Kelembagaan, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro										
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	-	-	-	-	3%	3%	100%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3000 orang	-	-	-	-	600 orang	600 orang	20%
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 Orang	-	-	-	-	500 orang	500 orang	100%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Kinerja Capaian Program & Kegiatan Akhir Periode Renstra 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2022	
					Target RenjaTahun 2021	Realisasi RenjaTahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = (10/4)
		Pembangunan Micro Library UMKM	2 paket	-	-	-	-			
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan usaha	500 orang	-	-	-	-	100 orang	100 orang	20%
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan kelembagaan dan usahanya	1000 orang	-	-	-	-	1250 orang	1250 orang	125%
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas akses pembiayaan	1000 orang	-	-	-	-	500 orang	500 orang	50%
Arah Kebijakan : Penguatan Kelembagaan, penguatan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha mikro										
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25%	-	-	-	-	20%	20%	80%
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	-	-	-	-	100 orang	100 orang	16.67%
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3000 orang	-	-	-	-	500 orang	500 orang	16.67%
		Pengembangan Co Working Space	5 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	20%

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa indikator Kinerja mengacu pada target indikator Kinerja pada Renstra 2021-2026 yang sebagian besar tidak sama dengan Target Kinerja yang tercantum pada Renstra 2016-2021 sehingga table diatas hanya mencantumkan target dan perkiraan capaian indikator Kinerja pada tahun 2022.

Adapun Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
 - a. Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 urusan, 8 Program dengan 8 Indikator Kinerja Program, 14 Kegiatan dengan 14 Indikator kinerja kegiatan dan 35 Sub kegiatan dengan 35 Indikator kinerja.
 - b. Dari 8 Indikator kinerja program, semua Indikator melampaui target.
 - c. Dari 14 Indikator kinerja kegiatan, semua Indikator melampaui target.
 - d. Dari 35 Indikator Kinerja Sub Kegiatan, semua Indikator melampaui target.
 - 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Perubahan II Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 urusan, 8 Program dengan 8 Indikator Kinerja Program, 14 Kegiatan dengan 14 Indikator kinerja kegiatan dan 35 Sub kegiatan dengan 35 Indikator kinerja.
 - b. Dari 8 Indikator kinerja program, semua Indikator melampaui target.
 - c. Dari 14 Indikator kinerja kegiatan, semua Indikator melampaui target.
 - d. Dari 35 Indikator Kinerja Sub Kegiatan, semua Indikator melampaui target.
- b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Semarang Tahun 2021

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SELISIH ANGGARAN (Rp)
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.716.673.017	8.002.383.663	714.289.354
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.614.200	7.156.000	1.458.200
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.263.900	1.646.250	617.650
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000	960	1.799.040
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.770.000	1.769.900	100
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.010.700	1.010.500	200
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.053.700	1.053.500	200
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.159	71.585	-64.426
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.576.762.223	7.205.654.692	371.107.531
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.325.034.123	7.001.305.942	323.728.181
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.380.000	203.020.000	47.360.000
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	672	65.325	-64.653
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	6.761	6.755	6
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.094.794	498.236.450	123.858.344
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	181.859.091	178.635.600	3.223.491
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.281.900	12.448.300	14.833.600
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.613.905	32.609.600	41.004.305
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.631.698	7.309.750	11.321.948
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	1.365.000	4.395.000
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.750.000	19.491.600	5.258.400
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.729.000	34.791.100	937.900
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	254.469.200	211.585.500	42.883.700
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.554.800	38.299.000	12.255.800
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.554.800	38.299.000	12.255.800
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.720.000	44.881.541	69.838.459
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.720.000	44.881.541	69.838.459
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	343.927.000	208.155.980	135.771.020
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	289.400.000	180.290.980	109.109.020
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.527.000	27.865.000	26.662.000

2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	189.916.820	145.913.100	44.003.720
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	74.374.560	59.350.600	15.023.960
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	74.374.560	59.350.600	15.023.960
2	17	2	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.542.260	86.562.500	28.979.760
2	17	2	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	115.542.260	86.562.500	28.979.760
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	256.267.400	183.162.850	73.104.550
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	256.267.400	183.162.850	73.104.550
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	185.915.900	129.477.850	56.438.050
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.351.500	53.685.000	16.666.500
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	508.309.000	405.601.000	102.708.000
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	508.309.000	405.601.000	102.708.000
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	508.309.000	405.601.000	102.708.000
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	852.277.846	722.693.250	129.584.596
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	852.277.846	722.693.250	129.584.596
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	852.277.846	722.693.250	129.584.596
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.713.421.640	1.299.591.537	413.830.103
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.713.421.640	1.299.591.537	413.830.103
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.713.421.640	1.299.591.537	413.830.103

2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5.605.657.600	3.451.807.001	2.153.850.599
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5.605.657.600	3.451.807.001	2.153.850.599
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.234.157.300	1.650.005.401	584.151.899
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	60.704.000	39.024.500	21.679.500
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	269.660.000	116.425.800	153.234.200
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	345.690.300	280.234.400	65.455.900
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2.695.446.000	1.366.116.900	1.329.329.100
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.900.346.800	3.423.806.688	476.540.112
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.900.346.800	3.423.806.688	476.540.112
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3.900.346.800	3.423.806.688	476.540.112
					Total	21.742.870.123	17.634.959.089	4.107.911.034

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendapatkan Alokasi anggaran setelah Perubahan sebesar Rp. 21.742.870.123,- yang bersumber dari PAD Kota Semarang sebesar Rp 18.268.325.717,- dari Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp. 2.983.534.406,- dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 491.010.000,- dengan rincian alokasi sebagai berikut :

- 1) Anggaran DAK digunakan untuk Pemberdayaan koperasi dan Pelaku Usaha Mikro dengan rincian untuk :
 - kegiatan Peningkatan manajemen Pengelolaan koperasi sebesar Rp. 343.707.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 338.197.000 atau sebesar 98,40%
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas kewirausahaan untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp. 147.303.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 134.372.000 atau sebesar 91,22 %.
- 2) Anggaran DID dimaksudkan untuk Pemulihan ekonomi termasuk pemberdayaan UMKM, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan rincian alokasi anggaran untuk :

- Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha mikro Rp. 1.149.021.396 dengan realisasi Rp. 820.070.801,- atau sebesar 71,37 %.
- Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Rp. 60.704.000,- dengan realisasi Rp. 39.024.500,- atau sebesar 64,29 %
- Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Rp. 269,660,000,- dengan realisasi Rp. 116,425,800,- atau sebesar 43.18 %
- Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp. 345,690,300,- dengan realisasi Rp. 280,234,400,- atau sebesar 81.07 %.
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Rp. 2,695,446,000,- dengan realisasi Rp. 1,366,116,900,- atau sebesar 50.68 % .

Pada Tahun 2021 aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, 14 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang sebesar Rp.21.742.870.123,-. terealisasi sebesar Rp 17.634.959.089,- (81,11%) dan sisa anggaran sebesar Rp 4.107.911.034,- (18,89 %) dengan uraian berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran sebesar Rp 8.716.673.017,- terealisasi sebesar Rp. 8.002.383.663,- (91,81%) dan sisa anggaran sebesar Rp 714.289.354,- (8,19 %).

Sisa anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain disebabkan oleh adanya selisih harga pada SSH serta belanja rutin seperti ATK dan barang cetakan tidak direalisasi karena kegiatan kantor yang tidak bisa dilaksanakan karena dampak Pandemi Covid 19. Selain itu pembayaran tagihan Listrik yang menyesuaikan tagihan pemakaian.

- b. Program Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM dengan Total

anggaran sebesar Rp 13.026.197.106,- terealisasi sebesar Rp 9.632.575.426,- (73,95%) dan sisa anggaran sebesar Rp 3.393.621.680,- (18,89 %).

Sisa anggaran ini dikarenakan adanya efisiensi belanja dengan menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya selisih harga antara SSH dengan harga pasar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis di bidang Koperasi dan Usaha kecil menengah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Perubahan II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2021 masih mengacu pada Renstra Perubahan II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021 karena tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Perubahan II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI		PROYEKSI	
			2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023
Tujuan:									
Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Koperasi Baik	-	88%	88%	88%	88,72%	88,61%	-	-
	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	-	25%	28%	32%	61.62 %	54,83%	-	-
Sasaran:									
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Nilai Omset Usaha Mikro	Persentase Koperasi Baik	-	88%	88%	88%	88,72%	88,61%	-	-
	Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	-	25%	28%	32%	61.62%	54,83%	-	-

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2021 tersebut di atas adalah dengan Tujuan **“Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing”** dan Sasaran **“Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Nilai Omset Usaha Mikro”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indikator “Persentase koperasi baik” dapat melampaui target, dimana dari target sebesar 88% dapat terealisasi sebesar 88,61% (capaian sebesar 100,69%);
- 2) Indikator “Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya” dapat melampaui target, dimana dari target sebesar 32% teralisasi sebesar 54,40% (capaian sebesar 170%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Koperasi dan Usaha kecil dan menengah juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

sampai Dengan Tahun 2021

1	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021				REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	TINGKAT	
2	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	3	4	5	6	1
1.	Prosentase Koperasi Baik	88 %	88,61%	100,69	Sangat Tinggi	88,72 %
2.	Prosentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	32 %	54,40 %	170	Sangat Tinggi	61,62 %
	INDIKATOR PROGRAM					
1	Cakupan pelayanan Admistrasi Perkantoran	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
2	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
3	Tertib Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi	100 %
4	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	60 %	58,82 %	98,03	Sangat Tinggi	30,12 %
5	Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	15 %	16,58 %	110,53	Sangat Tinggi	7,37 %
6	Prosentase Akses Pembiayaan	40 %	79,26 %	198,15	Sangat Tinggi	79,67 %
7	Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	50 %	87,91 %	175,82	Sangat Tinggi	7,05 %
8	Prosentase koperasi aktif	88,60 %	88,61 %	100,01	Sangat Tinggi	88,72 %
9	Prosentase koperasi sehat	30 %	32,54 %	108,47	Sangat Tinggi	20,61 %
10	Prosentase Omset Koperasi	0,80 %	-10,91 %	-1.363,7	Sangat Rendah	-25,66 %
11	Prosentase Akses Pemasaran	23 %	71 %	308,69	Sangat Tinggi	71,45 %

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dapat tercapai dengan tingkat capaian **sangat Tinggi**. Sedang capaian 11 indikator Kinerja Program yang ditargetkan pada Tahun 2021 berhasil dicapai dengan tingkat capaian **sangat Tinggi** sebanyak 10 Indikator Kinerja, dan **Sangat Rendah** sebanyak 1 Indikator Kinerja.

Pencapaian target Kinerja **sangat rendah** pada Prosentase omset Koperasi disebabkan karena dampak pandemi covid 19 sehingga banyak anggota koperasi yang menarik simpanannya di koperasi dan banyaknya penundaan

pembayaran angsuran pinjaman ke koperasi. hal tersebut sangat berpengaruh terhadap turunnya omset koperasi disebabkan karena hampir 75% koperasi di Kota Semarang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan atau mempunyai usaha simpan pinjam.

Selain dari aspek capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD

serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD dan kesesuaian program pada RKPD dengan program APBD sebesar 100 %; yang artinya bahwa semua program yang tercantum pada RPJMD, RKPD dan APBD pada Tahun 2021 adalah sama dan dapat dilaksanakan semua.

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH					
	Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro	Kec. Semarang Barat, Kec. Banyumanik, Kec. Ngaliyan	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	3 paket	
	Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah	Kec. Ngaliyan	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	1 paket	
	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	Kec. Semarang Barat, Kec. Semarang Timur, Kec. Tembalang, Kec. Banyumanik, Kec. Ngaliyan, Kec. Gayamsari	Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	6 paket	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH					
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Ngaliyan	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pengembangan usahanya	1 paket	
	Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Kec. Semarang Selatan, Kec. Semarang Barat, Kec. Candisari, Kec. Banyumanik, Kec. Gayamsari, Kec. Pedurungan,	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan	6 paket	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI					
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kec. Ngaliyan	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian	1 paket	
	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	Kec. Ngaliyan	Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkoperasian	1 paket	
	Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	Kec. Banyumanik	Koperasi yg mendapat pembinaan dalam penguatan dan perlindungan koperasi	1 paket	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM					
	Fasilitasi Promosi Produk Umkm	Kec. Semarang Barat, Kec. Tembalang, Kec. Banyumanik, Kec. Ngaliyan	UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	4 paket	
	Perluasan Akses Pasar	Kec. Semarang Barat, Kec. Gajahmungkur, Kec. Tembalang, Kec. Banyumank, Kec. Ngaliyan, Kec. Gayamsari	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar	6 paket	

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang diatas merupakan hasil dari usulan-usulan yang terangkum dalam Musrenbang Kecamatan. Usulan-usulan tersebut diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setelah melalui penelaahan akan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi pokok serta kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, serta disinkronkan dengan sasaran dan target yang harus dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021 berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021.

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2021 sudah baik, dimana sebagian besar indicator capaiannya 100%, bahkan beberapa indicator capaiannya melampaui 100% .

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, diantaranya:

- a. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Pengurus/pengelola Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang
- b. Masih kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap pendaftaran IUMK melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS berbasis Resiko;
- c. Keterbatasan Permodalan Para Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang;
- d. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada

pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan :

- a. Optimalisasi kegiatan sosialisasi pengurusan IUMK melalui OSS RBA kepada para pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang;
- b. Meningkatkan Sosialisasi Kredit Wibawa kepada masyarakat baik pelaku usaha mikro serta menyelenggarakan Forum Kemitraan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan lembaga Perbankan/Non Perbankan
- c. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Pengetahuan masyarakat tentang koperasi relatif terbatas sehingga mempengaruhi persepsi koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
- Lambatnya regenerasi didalam Koperasi.
- Lemahnya komunikasi diantara lembaga-lembaga yang melakukan pemberdayaan KUMKM.
- kurangnya kemandirian pelaku usaha mikro.
- Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat belum dioptimalkan oleh pelaku usaha mikro dalam pemasaran.

b. Peluang:

- Tren Pertumbuhan UMKM yang potensial di Kota Semarang.
- Keberpihakan Pemerintah kepada KUMKM melalui Peraturan Perundang-undangan antara lain UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas.
- Sumber daya alam yang melimpah
- Pembangunan infrastruktur secara massif memudahkan pergerakan arus barang/jasa

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis :

1. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasidan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 kegiatan ekspor roduknya; dan perlunya Optimalisasi PengembanganObyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE
2. Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha diprioritaskan pada upaya-upaya untuk:Meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan investasi, peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan sarana dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro terutama yang terdampak oleh Covid-19, peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, branding serta pemasaran produk, juga mendorong ekspor produk UMKM agar mampu bersaing dipasar internasional Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun ke tiga dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah “**Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saiang daerah yang didukung potensi unggulan daerah**” dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1 : Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2 : Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

Prioritas Daerah 3 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;

Prioritas Daerah 4 : Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan

3) Penguatan ketahanan pangan

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
- 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
- 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:

- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
- 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS

d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:

- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
- 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif

e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
- 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
- 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
- 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
- 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi

- 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya :
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan

penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya :
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:

- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui

upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas Pertama, yaitu “**Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;**”. dengan focus pada Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
- 2) Pengembangan kewirausahaan baru
- 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Catatan Penting	HASIL AKHIR KEBUTUHAN	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				23.539.963.000				24.702.036.168
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		3%	220.000.000	APBD Kota Semarang		3%	214.5121.290
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam		15 kop	95.000.000	APBD Kota Semarang		80 kop	91.666.650
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	80 kop	95.000.000	APBD Kota Semarang		2 kop	122.854.640
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		2 kop	125.000.000	APBD Kota Semarang		2 kop	122.854.640
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	140 kop	125.000.000	APBD Kota Semarang		140 kop	122.854.640
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi		50%	548.000.000	APBD Kota Semarang		50%	554.915.380
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	Kota Semarang	490 kop	548.000.000	APBD Kota Semarang		490 kop	554.915.380

	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	250 kop	260.000.000	APBD Kota Semarang		250 kop	241.871.090
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	Kota Semarang	240 kop	288.000.000	APBD Kota Semarang		240 kop	313.044.290
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	Kota Semarang	31%	180.000.000	APBD Kota Semarang		31%	366.205.089
	Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro/ Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	Kota Semarang	60.00%	180.000.000	APBD Kota Semarang		60.00%	366.205.089
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	300 Kop	180.000.000	APBD Kota Semarang		300 Kop	366.205.089
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	10%	245.000.000	APBD Kota Semarang		10%	335.896.070
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan		1%			1%		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	Kota Semarang	70%	145.000.000	APBD Kota Semarang		70%	335.896.070
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM/ anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	80 org	145.000.000	APBD Kota Semarang		300 org	335.896.070
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat pengetahuan dan keterampilan							
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pelatihan							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	Kota Semarang	25%	2.762.566.380	APBD Kota Semarang		26%	2.762.566.380
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian/ Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan	Kota Semarang	50%	2.762.566.380	APBD Kota Semarang		50%	2.762.566.380

			perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha						
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	80 kop	2.762.566.380	APBD Kota Semarang	80 kop	2.762.566.380
	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	60 kop	APBD Kota Semarang				
	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	200 kop	APBD Kota Semarang				
	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	480 kop	APBD Kota Semarang				
	Jumlah laporan updating data Koperasi		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12 lap	APBD Kota Semarang				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	Kota Semarang	3%	2.792.070.650	APBD Kota Semarang	3%	3.792.070.650
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	Kota Semarang	1.050 org	2.792.070.650	APBD Kota Semarang	1.050 org	3.792.070.650	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 org	522.672.200	APBD Kota Semarang	100 org	522.672.200	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 org	227.454.550	APBD Kota Semarang	100 org	227.454.550	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	500 org	2.080.993.000	APBD Kota Semarang	500 org	2.080.993.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	200 org	515.022.000	APBD Kota Semarang		200 org	515.022.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	150 Org	445.928.900	APBD Kota Semarang		150 Org	445.928.900
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	Kota Semarang	20%	3.963.898.830	APBD Kota Semarang		20%	3.963.898.830
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	Kota Semarang	150 org	3.963.898.830	APBD Kota Semarang		150 org	3.963.898.830
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	500 org	3.963.898.830	APBD Kota Semarang		500 org	3.963.898.830
		Pengembangan Co Working Space	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 paket					
	NON URUSAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 %	12.711.962.479	APBD Kota Semarang		100%	12.711.962.479
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	Kota Semarang	100%				100%	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%				100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kota Semarang	10 dok	12.195.560	APBD Kota Semarang		10 dok	12.195.580
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 dok	564.080	APBD Kota Semarang		2 dok	564.080
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	3.117.280
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	3.117.280	APBD Kota Semarang		1 dok	3.729.190
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	3.729.190	APBD Kota Semarang		1 dok	1.610.080

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1.610.080	APBD Kota Semarang		1 dok	1.961.990
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	1.961.990	APBD Kota Semarang		3 dok	1.212.960
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%	1.212.960			100%	9.215.117.840
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	3 dok	9.215.117.840			3 dok	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	8.960.986.160	APBD Kota Semarang		100%	8.960.986.160
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	252.840.000	APBD Kota Semarang		100%	252.840.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dok	596.480	APBD Kota Semarang		1 dok	596.480
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 dok	695.200	APBD Kota Semarang		2 dok	695.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Semarang	100%	1.241.092.527	APBD Kota Semarang		100%	1.241.092.527
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 jenis	231.107.778	APBD Kota Semarang		3 jenis	231.107.778
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 jenis	27.209.000	APBD Kota Semarang		5 jenis	27.209.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	35 jenis	94.077.190	APBD Kota Semarang		35 jenis	94.077.190
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	8 jenis	46.964.379	APBD Kota Semarang		8 jenis	46.964.379
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 jenis	1.920.000	APBD Kota Semarang		2 jenis	1.920.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 org	54.000.000	APBD Kota Semarang		100 %	54.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100 keg	537.215.860	APBD Kota Semarang		100 keg	537.215.860
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 jenis	248.598.321	APBD Kota Semarang		5 jenis	248.598.320

			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100%	95.362.120	APBD Kota Semarang		100%	95.362.120
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3 jenis	44.837.384	APBD Kota Semarang		3 jenis	44.837.384
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2 jenis	50.524.736	APBD Kota Semarang		2 jenis	50.524.736
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang	100%	116.640.000	APBD Kota Semarang		100%	116.640.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	116.640.000	APBD Kota Semarang		100%	116.640.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	Kota Semarang	100%	2.031.554.412	APBD Kota Semarang		100%	2.031.554.412
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 unit	36.318.180	APBD Kota Semarang		1 unit	36.318.180
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	25 unit	316.345.380	APBD Kota Semarang		25 unit	316.345.380
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5 jenis	50.476.070	APBD Kota Semarang		5 jenis	50.476.070
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Rehabilitasi Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	1.628.414.782	APBD Kota Semarang		100%	1.628.414.782

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan serta pokok pikiran DPRD Kota Semarang.

Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH					
	Peningkatan mutu kemasan produksi	Kec. Semarang Utara	Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu kemasan produksi	40 Orang/Ka	
	Peningkatan meracik kopi di Kampung Tematik	Kec. Semarang Utara	Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pelatihan meracik kopi di Kampung Batik	14 Orang/Ha	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH					
	Sosialisasi tentang manajemen UKM	Kec. Kalibanteng Kidul	Pelaku Usaha Mikro yg mendapatkan sosialisasi tentang manajemen UKM	50 Orang	
	Sosialisasi perizinan bagi UMKM	Kec. Karangayu	Pelaku Usaha Mikro yg mendapatkan sosialisasi perizinan bagi UMKM	1 Kegiatan	
	Pelatihan pengembangan usaha mikro produktif	Kec. Karangayu	Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pelatihan pengembangan Usaha Mikro Produktif	1 Kegiatan	
	Pelatihan keterampilan dibidang jasa dan kuliner era milenial	Kec. Gajahmungkur	Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pelatihan keterampilan baik dibidang jasa dan pelatihan kuliner era milenial	1 Kegiatan	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI					
	Pelatihan Manajemen Koperasi	Kec. Bendan Ngisor	Kelompok masyarakat yang mendapatkan pelatihan manajemen koperasi	1 Kegiatan	

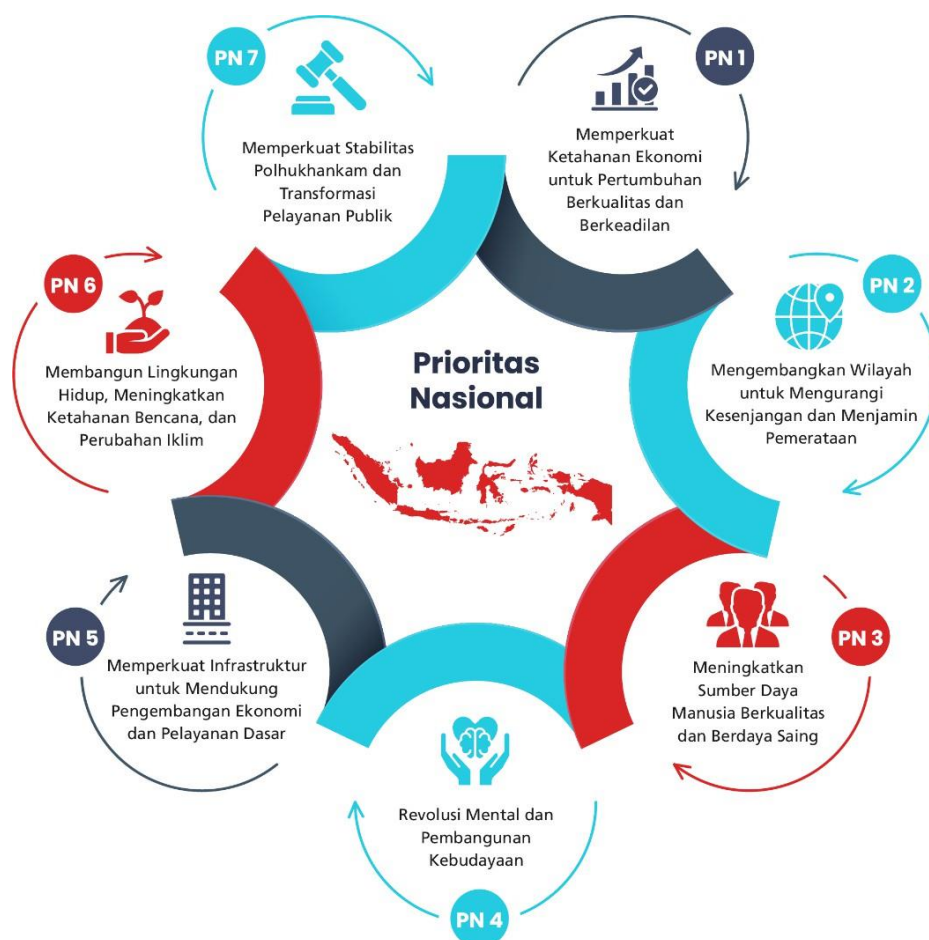
	Sosialisasi Perijinan Sertifikasi Halal	Kec. Bendan Ngisor	Kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi perizinan sertifikasi halal	1 Kegiatan	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM					
	Fasilitasi Pembentukan Wadah Pemasaran UMKM secara Online dan Offline	Kec. Gayamsari	UMKM yang mendapatkan fasilitasi pembentukan wadah pemasaran UMKM secara online dan offline	40 Orang	
	Pelatihan Ijin Edar Usaha/PIRT	Kec. Gayamsari	UMKM yang mendapatkan pelatihan edar usaha/PIRT	40 Orang	

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuan) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

- PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk

Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia

- PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan
Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
- PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi
Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan
Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai dinas teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung pencapaian program Nasional yang ke 1 yaitu **“Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”** khususnya pada **“PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi”**

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau

- sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sasaran Ekonomi makro 7,5-8;
 - c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
 - d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
 - e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan tahun 2021 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik padaakhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, dimana Tema Pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 adalah “**Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari**”. Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing.

4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro

dengan indikator tujuan :

- 1) Persentase Koperasi yang Berkualitas
- 2) Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi
- b. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
- c. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Koperasi aktif
- b. Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
- c. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	- Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	54,00
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	- Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	13,00
SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	- Persentase Koperasi aktif	%	76,50
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	- Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	35,00
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	%	77,50

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bertugas mendukung pencapaian Misi ke 2 **“Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila”**. Namun secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Laju Pertumbuhan ekonomi”** dan indikator sasaran **“ Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB”**.
3. Keselarasan program dan kegiatan antara Kebijakan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan.
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 8 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 7 program pelaksanaan / pembangunan;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 14 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 8 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.
3. Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 38 Sub kegiatan, yang terdiri dari 25 Sub kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 13 Sub kegiatan pelaksanaan/pembangunan
4. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar 24.702.036.168,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 12.711.962.479,- untuk program, Kegiatan dan sub kegiatan penunjang
 - b. Rp 11.990.073.689,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

Adapun rencana program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program, Kegiatan dan Sub kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						24.702.036.168	19.860.101.000			
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						24.702.036.168	19.860.101.000			
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3.00	Persen			214.521.290	50.000.000		
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15.00	koperasi			91.666.650	25.000.000		
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah		Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	80.00	Koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.00	Unit Usaha	91.666.650	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2.00	Koperasi				122.854.640	25.000.000	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	140.00	Koperasi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.00	Unit Usaha	122.854.640	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50.00	Persen				554.915.380	150.000.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	490.00	koperasi				554.915.380	150.000.000	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang diawasi	250.00	koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	370.00	Unit Usaha	241.871.090	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	240.00	koperasi	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	240.00	Unit Usaha	313.044.290	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase Koperasi sehat	31.00	Persen				366.205.089	50.000.000	

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	60.00	Persen				366.205.089	50.000.000	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300.00	koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300.00	Unit Usaha	366.205.089	50.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10.00	Persen				335.896.070	145.000.000	
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1.00	Persen						
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70.00	Persen				335.896.070	145.000.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan		Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	300.00	Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	360.00	Orang	335.896.070	145.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Kompetensi SDM Koperasi										
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	26.00	Persen				2.762.566.380	290.000.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50.00	Persen				2.762.566.380	290.000.000	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Penguatan dan Perlindungan Koperasi	80.00	koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	500.00	Orang	2.762.566.380	290.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Kemitraan	60.00	koperasi						
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Usaha	200.00	Koperasi						
			Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Pendampingan Kelembagaan	480.00	koperasi						
			Jumlah laporan updating data Koperasi	12.00	Laporan						
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3.00	persen				3.792.070.650	3.496.052.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan	-	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	1050.00	orang				3.792.070.650	3.496.052.000	

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Para Pemangku Kepentingan										
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	100.00	orang	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	Unit Usaha	522.672.200	390.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	100.00	orang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100.00	Unit Usaha	227.454.550	830.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	500.00	orang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	660.00	Unit Usaha	2.080.993.000	1.995.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	200.00	orang	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	500.00	Orang	515.022.000	281.052.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150.00	bu	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150.00	Orang	445.928.900	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20.00	%				3.963.898.830	2.248.021.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	150.00	orang				3.963.898.830	2.248.021.000	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500.00	orang	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500.00	Unit Usaha	3.963.898.830	2.248.021.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
			Pengembangan Co Working Space	1.00	paket						
NON URUSAN											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	persen				12.711.962.479	13.431.028.000	
			Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100.00	Persen						
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00	Persen						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10.00	dokumen				12.195.580	6.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00	Dokumen	564.080	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Jumlah Dokumen RTP SKPD	1.00	Dokumen						
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	Dokumen	3.117.280	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	Dokumen	3.729.190	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	Dokumen	1.610.080	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1.00	dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	Dokumen	1.961.990	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3.00	dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00	Laporan	1.212.960	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	Persen				9.215.117.840	12.195.028.000	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00	Dokumen						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35.00	Orang/bulan	8.960.986.160	11.943.028.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi		Persentase ASN yang disediakan	100.00	Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12.00	Dokumen	252.840.000	250.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan Tugas			Pelaksanaan Tugas ASN					
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00	Laporan	596.480	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00	Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.00	Laporan	695.200	1.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00	Persen				1.241.092.527	680.000.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14.00	Paket	231.107.778	50.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5.00	jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.00	Paket	27.209.000	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00	jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00	Paket	94.077.190	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8.00	jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00	Paket	46.964.379	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2.00	jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12.00	Dokumen	1.920.000	5.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang berkunjung	100.00	orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	Laporan	54.000.000	50.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100.00	kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	Laporan	537.215.860	250.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00	jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.00	Dokumen	248.598.320	200.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	persen				95.362.120	50.000.000	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang disediakan	3.00	jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.00	Unit	44.837.384	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2.00	jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.00	Unit	50.524.736	25.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	Persentase Tersedianya	100.00	persen				116.640.000	125.000.000	

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Pemerintahan Daerah		kebutuhan jasa kantor								
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	Laporan	116.640.000	125.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100.00	Persen				2.031.554.412	375.000.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1.00	unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00	Unit	36.318.180	40.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	26.00	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25.00	Unit	316.345.380	260.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.00	jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.00	Unit	50.476.070	75.000.000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung		Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	100.00	persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1.00	Unit	1.628.414.782	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Kode	Program/Keg/SubKeg	Prioritas Daerah	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan			Hasil Kegiatan / Hasil Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)			PAGU INDIKATIF	PERKIRAAN (N+1) Rp.	Unit Pelaksana
			Uraian	Target	Satuan	Uraian	Target	Satuan			
	Kantor atau Bangunan Lainnya					Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					
JUMLAH									24.702.036.168	19.860.101.000	

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaandokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

Semarang, 14 Juli 2022

Kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang



Drs. AGUS WURYANTO, M.Si